



Naskah Pidato

Update: 10/02/2026_V2

Jumlah kata: 3.209

Durasi: 30 menit

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

"PENGADILAN TERPERCAYA, RAKYAT SEJAHTERA"

Balairung Mahkamah Agung RI
Jakarta, Selasa 10 Februari 2026

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

- Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kum HAM) Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
- Yang Terhormat Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
- Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, yaitu:
 1. Ketua Mahkamah Agung TIMOR LESTE, Yang Mulia Afonso Carmona, beserta delegasi;
 2. Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung/Wakil Menteri Kehakiman Kerajaan ARAB SAUDI, Yang Mulia Dr. Najem Abdullah Muhammad al-Zaid, beserta delegasi;
 3. Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung Negara QATAR, Yang Mulia Ahmad Mohammad Al-Mansouri, beserta delegasi;

4. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Demokratik Rakyat LAOS, Yang Mulia Bounkhouang THAVISACK, beserta delegasi;
5. Wakil Ketua Mahkamah Agung Federal Circuit and Family Court of AUSTRALIA, Yang Mulia Justice Suzanne Christie, beserta delegasi;
6. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Islam IRAN, Yang Mulia Naser Seraj, beserta delegasi;
7. Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Rakyat CHINA, Yang Mulia Mr. WANG Bin, beserta delegasi;
8. Hakim Agung Dewan Peradilan Agung Negara KUWAIT, Yang Mulia Khaled Ali Utsman Yusuf Ahmad Utsman, beserta delegasi;
9. Hakim Agung Mahkamah Agung SINGAPURA, Yang Mulia Hri Kumar Nair, beserta delegasi;
10. Hakim Agung Mahkamah Agung MALAYSIA, Yang Mulia Dato' Indera Mohd Arief Emran Bin Arifin;
11. Hakim Agung Mahkamah Agung KOREA SELATAN, Yang Mulia Justice Chun Dae-yup, beserta delegasi; serta
12. Yang Mulia Para Delegasi dari Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, MALAYSIA;

- Yang Terhormat Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- Yang Mulia Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Para Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional, dan Para Mitra Pembaruan Mahkamah Agung;
- Yang Mulia Para Purnabakti, Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim *Ad Hoc*, Para Ketua Tingkat Banding dan Para Ketua Tingkat Pertama seluruh Indonesia;
- Yang Terhormat Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia;
- Yang Terhormat Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta jajaran;
- Yang Terhormat Para Pimpinan Redaksi, Para Jurnalis, dan Para Wartawan dari Media Cetak, Media Elektronik, dan Media *Online*; dan
- Seluruh warga peradilan yang hadir baik secara langsung maupun virtual, serta seluruh hadirin yang saya hormati.

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti Sidang Istimewa penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025.

Laporan Tahunan ini merupakan wujud akuntabilitas Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya, yang memuat capaian kinerja, tantangan, serta berbagai inovasi sepanjang tahun 2025. Tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera” menegaskan bahwa seluruh kinerja Mahkamah Agung tidak hanya diarahkan pada pencapaian kelembagaan, tetapi juga terwujudnya peradilan yang berintegritas, dipercaya publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hadirin yang Saya muliakan,

Melalui Sidang Istimewa ini, perkenankan saya menyampaikan Laporan Tahunan yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi konstitusional, meliputi fungsi pengaturan, peradilan, pengawasan, pemberian nasihat, dan administrasi.

1. FUNGSI MENGATUR

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan, sepanjang tahun 2025 Mahkamah Agung menetapkan 5 (lima) Peraturan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan perhatian serius terhadap reformasi hukum pidana seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui penetapan Surat Edaran serta penguatan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

2. FUNGSI PERADILAN

Hadirin yang Saya muliakan,

Salah satu indikator utama kinerja Badan Peradilan yang dapat diukur secara objektif adalah kinerja penanganan perkara. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan capaian kinerja bidang penyelesaian perkara.

Sepanjang tahun 2025, **Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya** menangani 3.025.152 perkara. Sebanyak 97,11% atau 2.937.634 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu, sehingga sisa perkara hanya 2,89%. Capaian ini mempertahankan rasio produktivitas di atas 97% selama enam tahun berturut-turut.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara pada semua tingkatan peradilan sebagai berikut.

Selama tahun 2025, beban perkara yang ditangani **Mahkamah Agung** berjumlah 38.148 perkara, terdiri atas 37.918 perkara baru dan 230 perkara sisa tahun 2024. Jumlah ini meningkat 22,51% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat 31.138 perkara.

Dari keseluruhan beban tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 37.973 perkara atau sebesar 99,54%. Jumlah ini meningkat 22,86% dibandingkan tahun 2024 yang memutus 31.138 perkara. Dengan capaian tersebut, sisa perkara pada akhir tahun hanya sebesar 0,46%. Saya bersyukur selama enam tahun berturut-turut, Mahkamah Agung secara konsisten mampu mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% dan sisa perkara di bawah 1%.

Ditinjau dari aspek ketepatan waktu penyelesaian perkara, dari total 37.973 perkara yang diputus, sebanyak 37.791 perkara atau 99,52% diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari tiga

bulan. Capaian ini meningkat 0,35% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 99,17%.

Selanjutnya, dari aspek minutasi, Mahkamah Agung berhasil mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan pengaju sebanyak 36.931 perkara. Kinerja minutasi pada tahun 2025 ini meningkat 18,51% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.728 perkara atau 96,74% diselesaikan dalam tenggang waktu kurang dari tiga bulan. Tingkat ketepatan waktu minutasi ini meningkat 0,24% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 96,50%, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Hadirin yang terhormat,

Peningkatan beban penanganan perkara di Mahkamah Agung tersebut ditangani oleh 48 orang Hakim Agung. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perselisihan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang Hakim Ad Hoc, terdiri atas 3 Hakim Ad Hoc Tipikor dan 5 Hakim Ad Hoc PHI.

Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap Hakim Agung pada tahun 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan. Meskipun terjadi *overload* beban perkara, para Hakim Agung tetap mampu menyelesaikan

99,54% dari beban tersebut, yaitu sekitar 2.373 perkara per tahun atau 198 perkara per bulan.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sejak 1 Mei 2024, yang pada tahun 2025 telah mencapai rasio penggunaan sebesar 96,58%.

Selain meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan peradilan, penerapan sistem *e-court* juga memberikan **kontribusi terhadap pelestarian lingkungan**. Melalui digitalisasi penanganan perkara pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, serta peninjauan kembali sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO₂ sebanyak 805.631 kg.

Hadirin yang Saya muliakan,

Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan kinerja penanganan perkara pada **Pengadilan Tingkat Banding** di empat lingkungan peradilan serta Pengadilan Pajak.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak menangani 64.377 perkara, terdiri atas perkara tahun 2025 sebanyak 53.062 dan sisa tahun 2024 sebanyak 11.315. Jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 51.855 atau meningkat 10,66% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 46.860 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara meningkat 0,29% dari tahun 2024 yang berjumlah 80,56% menjadi 80,79%.

Beban perkara tersebut ditangani oleh 1.226 orang Hakim Tinggi, dengan dukungan 101 orang Hakim Ad Hoc tingkat banding untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan komposisi ini, rata-rata setiap hakim menangani sekitar 158 perkara dalam satu tahun.

Sementara itu, pada **Pengadilan Tingkat Pertama** di empat lingkungan peradilan, beban perkara yang ditangani pada tahun 2025 mencapai 2.922.627 perkara, yang terdiri atas 2.849.505 perkara yang diterima tahun 2025 dan sisa tahun 2024 sebanyak 73.122 perkara. Dari jumlah beban tersebut, pengadilan berhasil menyelesaikan 97,43% atau 2.918.625 perkara. Dalam lima tahun terakhir, secara konsisten sisa perkara pada pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan kurang dari 3%.

Seluruh beban perkara tersebut ditangani oleh 7.032 orang hakim tingkat pertama, dengan dukungan 356 orang Hakim Ad Hoc

tingkat pertama untuk menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian, rerata beban kerja setiap hakim tingkat pertama mencapai 1.247 perkara per tahun.

Seluruh **indikator kinerja pada semua tingkatan pengadilan**, mulai dari jumlah perkara yang diputus, produktivitas penyelesaian perkara, ketepatan waktu memutus perkara, hingga ketepatan waktu minutasasi pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, tingkat akseptabilitas putusan juga berada pada angka yang signifikan, yaitu 94,29% untuk putusan pengadilan tingkat pertama dan 90,35% untuk putusan kasasi. Sementara akseptabilitas putusan tingkat banding berada di angka 37,82%.

Mahkamah Agung dan badan peradilan secara konsisten meningkatkan transparansi peradilan. Salah satunya melalui publikasi putusan. Hingga saat ini, telah tersedia **10,4 juta** putusan yang bisa diakses melalui Direktori Putusan.

Meningkatnya jumlah perkara yang diterima, disertai dengan tingginya tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan, mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hadirin yang Saya muliakan,

Mahkamah Agung juga terus memperkuat alternatif penyelesaian sengketa perdata dengan **mediasi** dan prosedur gugatan sederhana. Demikian juga dalam penyelesaian perkara pidana, Mahkamah Agung mengedepankan mekanisme **diversi**, dan penerapan **keadilan restoratif**. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi dan karakter budaya bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui **mediasi** mencapai 39.520 dari total 88.365 perkara yang dimediasi. Keberhasilan ini meningkat 56,11% dari tahun 2024 yang berjumlah 28,65% menjadi sebesar 44,72%.

Selanjutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana anak, sebanyak 645 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme **diversi**, atau sebesar 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat untuk diversi. Rasio keberhasilan diversi meningkat 82,77% dari 42,57% pada tahun 2024 menjadi 77,80%.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga mencatat terdapat 3.353 perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan **keadilan restoratif**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung juga terus mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui **gugatan sederhana**. Pada tahun 2025,

pengadilan negeri berhasil menyelesaikan 7.065 perkara gugatan sederhana, dan pengadilan agama menyelesaikan 348 perkara gugatan sederhana ekonomi syariah. Mekanisme ini terbukti efektif bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Hadirin yang Saya muliakan,

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Dalam sejumlah putusan peninjauan kembali perkara pajak, **Mahkamah Agung memerintahkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak kepada negara.**

Sepanjang tahun 2025, melalui Putusan Peninjauan Kembali Pajak, Mahkamah Agung telah mewajibkan pembayaran sebesar Rp20.891.807.732.972,00 (dua puluh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan USD 107.434.098,67 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan dolar Amerika enam puluh tujuh sen).

Putusan-putusan tersebut menegaskan peran Mahkamah Agung dalam mendukung **optimalisasi penerimaan negara**, khususnya dari sektor perpajakan.

Selain itu, dalam penanganan perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer, Mahkamah Agung beserta badan

peradilan dibawahnya tidak hanya menjatuhkan pidana pokok, tetapi juga menetapkan **kewajiban pembayaran denda dan uang pengganti**. Sepanjang tahun 2025, total nilai **denda dan uang pengganti** yang ditetapkan melalui putusan pengadilan mencapai Rp65.702.259.123.814,00 (Enam puluh lima triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah). Angka ini mencerminkan **kontribusi peradilan dalam upaya pemulihan keuangan negara**.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas sinergi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran denda dan uang pengganti. Pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan faktor penting dalam menjamin terlaksananya putusan pengadilan, sehingga nilai-nilai keadilan yang telah diputus tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terimplementasi melalui pemulihan keuangan negara.

Mahkamah Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, atas dukungan dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata. Kehadiran dan profesionalisme jajaran Kepolisian memastikan proses eksekusi dapat berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta menjadi

bagian penting dalam menjamin bahwa keadilan yang telah diputuskan oleh pengadilan, benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di samping itu, Mahkamah Agung juga berkontribusi melalui **Penerimaan Negara Bukan Pajak**. Pada tahun 2025, PNBP yang dihasilkan mencapai Rp87.073.332.242,00 (Delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), meningkat sebesar 15,88% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah Rp75.143.960.113,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus tiga belas rupiah).

Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam **penguatan keuangan negara** serta mendukung **terwujudnya kesejahteraan rakyat**.

3. FUNGSI PENGAWASAN

Hadirin yang Saya muliakan,

Mahkamah Agung terus memperkuat fungsi pengawasan guna mencegah penyimpangan dan menegakkan integritas peradilan. Pada tahun 2025, sebanyak 27 satuan kerja ditunjuk untuk menerapkan **Sistem Manajemen Anti Penyupaan**, dengan

22 satuan kerja telah memenuhi kriteria dan 5 satuan kerja masih dalam tahap penangguhan.

Pengelolaan **pengaduan masyarakat** juga terus dioptimalkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 5.561 pengaduan, dengan 4.263 pengaduan telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses.

Mahkamah Agung mengapresiasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima 61 usulan sanksi terhadap hakim, dengan hasil 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin, 33 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial, dan 16 usulan masih dalam proses.

Selain pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Agung juga secara aktif melaksanakan pengawasan internal. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan 220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan, yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan.

4. FUNGSI NASIHAT

Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat

hukum, yang dikenal dengan permohonan fatwa, kepada lembaga negara maupun lembaga pemerintahan.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 11 (sebelas) permohonan fatwa. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan pendapat hukum atau nasihat hukum.

Pelaksanaan fungsi ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung, dalam mendukung pemerintahan yang taat hukum, serta memastikan setiap kebijakan berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. FUNGSI ADMINISTRATIF

Hadirin yang terhormat,

Mahkamah Agung terus berupaya memperkuat fungsi administratif meliputi pengelolaan Sumber Daya Manusia, tata kelola keuangan, sarana dan prasarana, serta tata organisasi, sebagai fondasi bagi terwujudnya peradilan yang profesional dan modern.

Dalam bidang **Sumber Daya Manusia**, pada tahun 2025, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya didukung oleh 44.532 orang aparatur. Jumlah tersebut terdiri atas 48 Hakim Agung, 9 Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, 8.544 hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, 457 Hakim Ad

Hoc pada pengadilan tingkat pertama dan banding, 10.520 tenaga kepaniteraan, serta 24.954 tenaga kesekretariatan.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui 28 pelatihan teknis dengan 6.004 peserta, serta 51 pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan dengan 13.759 peserta.

Selain itu, Mahkamah Agung memperoleh apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilan menyelesaikan disparitas data kepegawaian hingga 100 persen. Capaian ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap tata kelola kepegawaian yang tertib dan akurat.

Dari sisi **Pengelolaan Keuangan**, pada tahun 2025 Mahkamah Agung memperoleh pagu anggaran sebesar Rp13.145.686.448.000 (tiga belas triliun seratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp12.897.974.521.173 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), atau 98,12 persen. Capaian ini mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal dan pengelolaan keuangan yang efektif.

Atas kinerja tersebut, Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2025 kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari

Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-13 kali berturut-turut, dan juga ditetapkan sebagai *role model* pelaporan keuangan oleh Kementerian Keuangan. Capaian ini memperkuat kesiapan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan kemandirian anggaran sesuai amanat konstitusi.

Sehubungan dengan penyediaan **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas akses terhadap keadilan, pada tahun 2025, Mahkamah Agung membangun 13 gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan 5 gedung Pengadilan Tingkat Banding.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung terus mengembangkan teknologi informasi peradilan sesuai Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mencakup sistem manajemen perkara dan sistem manajemen peradilan.

Dalam **pengelolaan organisasi**, Mahkamah Agung mengelola 930 satuan kerja yang terdiri atas Kepaniteraan Mahkamah Agung dan 6 unit Eselon I di pusat, serta 923 satuan kerja daerah yang meliputi 416 peradilan umum, 446 peradilan agama, 38 peradilan tata usaha negara, dan 23 peradilan militer.

Untuk memperluas akses layanan peradilan, pada tahun 2025 dibentuk 2 Pengadilan Militer Tinggi dan 3 Pengadilan Militer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 2025, serta

13 Pengadilan Negeri, 9 Pengadilan Agama, dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 39, 40, dan 41 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan penguatan integritas, pada tahun 2025 sebanyak 19 unit kerja berhasil meraih predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dengan demikian, hingga tahun 2025 terdapat 278 unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan 16 di antaranya juga memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sementara itu, pada bidang keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung kembali meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2025 dengan nilai 97,43, meningkat dari nilai 96,09 pada tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan komitmen organisasi peradilan yang terbuka, akuntabel, dan terpercaya.

Hadirin yang Saya muliakan,

Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengesahan *Statute of the Hague Conference on Private International Law*. Kehadiran peraturan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum perdata nasional dan kepastian hukum penyelesaian sengketa lintas negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mencatat bahwa sejumlah putusan pengadilan Indonesia, khususnya di bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, telah memperoleh pengakuan di berbagai yurisdiksi asing. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan komunitas internasional terhadap sistem hukum Indonesia.

Mahkamah Agung bersama para pemangku kepentingan hukum, berkomitmen terus memperkokoh sistem hukum nasional dan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama hukum internasional.

Hadirin yang Saya muliakan,

Di tengah berbagai capaian yang telah diraih, Mahkamah Agung tetap berkomitmen melakukan perbaikan untuk mewujudkan peradilan yang semakin berkualitas.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung menyadari bahwa seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyampaikan **penghargaan** yang setinggi-tingginya dan rasa **terima kasih** yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, atas komitmen dan dukungan melalui penerbitan berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden yang strategis. Kebijakan-kebijakan tersebut telah

menjadi **tonggak penting**, yang secara signifikan memperkuat fondasi serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para Ketua Mahkamah Agung negara-negara sahabat, para perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sesuai dengan kapasitasnya.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Mahkamah Agung atas dedikasi dan pengabdianya, sehingga Mahkamah Agung mampu meraih berbagai capaian yang bermakna dalam memperkuat kepercayaan publik. Saya juga berpesan kepada seluruh warga peradilan bahwa: **“Peradilan yang dijalankan dengan integritas akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan terhadap hukum merupakan pondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat.”**

Selanjutnya, dengan segala hormat, saya mohon perkenan Yang Terhormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kum HAM) Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., untuk menyampaikan pidato kepada seluruh warga

peradilan yang mengikuti acara ini, baik secara langsung maupun virtual.

Demikian penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Februari 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO